

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berlandaskan pada identifikasi rumusan masalah serta sintesis antara temuan lapangan dan tinjauan kritis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka poin-poin intisari dari studi ini dapat diuraikan di bawah ini:

Implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan oleh Dinkominfoasandi berlandaskan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017. Website PPID Kabupaten Purworejo telah tersedia dan beroperasi sebagai sarana penyediaan informasi publik. Pengelolaan penyimpanan dan dokumentasi informasi telah dilakukan secara terstruktur dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta penyediaan informasi kepada publik telah berjalan.

Namun demikian, kemudahan akses website dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara luas belum terpenuhi. Masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mengakses dan menavigasi layanan, serta kesadaran publik terhadap keberadaan layanan ini masih sangat rendah sehingga layanan yang telah tersedia belum termanfaatkan secara maksimal.

Dari sisi faktor pendorong dan penghambat yang dianalisis menggunakan kerangka teori Edwards III, ditemukan bahwa faktor pendorong umumnya bersumber dari aspek kelembagaan., Infrastruktur teknis yang

memadai, SOP yang tersedia secara terbuka, serta jalur komunikasi internal yang terstruktur menjadi fondasi yang cukup kokoh bagi berjalannya implementasi kebijakan. Sementara itu, faktor penghambat umumnya bersumber dari aspek sumber daya manusia dan komunikasi kepada masyarakat. Beban kerja ganda yang ditanggung seluruh personel, kesenjangan pemahaman operator OPD tentang substansi keterbukaan informasi, tidak adanya mekanisme transfer ilmu saat pergantian personel, ketiadaan anggaran khusus, serta minimnya sosialisasi spesifik tentang keberadaan website PPID kepada masyarakat menjadi hambatan yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi publik melalui website PPID di Kabupaten Purworejo telah berjalan secara bertahap tetapi belum sepenuhnya optimal. Di mana fondasi kelembagaan yang dimiliki sudah cukup baik tetapi tantangan terbesar justru terletak pada aspek operasional dan jangkauan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran utama kebijakan..

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinkominfoasandi selaku implementor kebijakan sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi seluruh operator PPID Pelaksana OPD yang difokuskan pada substansi keterbukaan informasi publik, khususnya pemahaman mengenai klasifikasi informasi yang wajib

dipublikasikan dan batas informasi yang dikecualikan. Pelatihan ini perlu dijadwalkan secara rutin dan tidak hanya dilakukan sekali, mengingat pergantian personel yang terus terjadi. Dengan demikian, kesenjangan antara kompetensi teknis dan kompetensi substansial yang selama ini menjadi hambatan dapat diatasi secara sistematis.

2. Menyusun dan menerapkan mekanisme serah terima jabatan yang terstandar setiap kali terjadi pergantian personel, baik di tingkat PPID Utama maupun PPID Pelaksana OPD. Mekanisme ini mencakup pendokumentasian seluruh prosedur operasional, akses sistem, catatan permasalahan yang pernah dihadapi, dan informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh personel baru agar dapat langsung bekerja secara efektif tanpa harus memulai dari awal.
3. Melaksanakan sosialisasi yang spesifik dan terencana mengenai keberadaan website PPID kepada masyarakat, tidak cukup hanya melalui media sosial secara umum. Sosialisasi perlu menjangkau masyarakat secara langsung melalui berbagai momen pelayanan tatap muka di seluruh instansi dengan menetapkan standar yang mewajibkan petugas untuk secara aktif menginformasikan keberadaan kanal layanan daring PPID kepada setiap masyarakat yang datang.
4. Melakukan perbaikan antarmuka website PPID dengan menambahkan panduan penggunaan dan informasi pengantar di halaman utama agar masyarakat awam dapat memahami fungsi dan cara menggunakan layanan tanpa bantuan petugas. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi mesin

pencari agar website PPID dapat ditemukan secara langsung melalui kata kunci umum tanpa harus mengetahui alamat subdomain terlebih dahulu.

5. Mengupayakan alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan dan pengembangan PPID dalam dokumen perencanaan anggaran tahunan. Anggaran ini perlu mencakup penyelenggaraan pelatihan berkala bagi operator, pengembangan teknis dan pemeliharaan website, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya anggaran yang terpisah dan terencana, seluruh kegiatan pengembangan PPID tidak lagi bergantung pada sisa anggaran kegiatan lain dan dapat dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.